



## Observasi Laporan Penerapan E-Spt Pph Unifikasi Dan Pph 21 Di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman

Dosroha Elisabet Sipakkar<sup>1</sup>, Rochmad Bayu Utomo<sup>2</sup>

Prodi Akuntansi, Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta<sup>1</sup>

Universitas Mercu Buana Yogyakarta, Yogyakarta<sup>2</sup>

Email: [elisabetsipakkar24@gmail.com](mailto:elisabetsipakkar24@gmail.com)

### ABSTRAK

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memanfaatkan kemajuan system teknologi dan informasi yang saat ini berkembang dengan pesat dan baik. Terbentuklah inovasi dengan menciptakan aplikasi (e-SPT) dalam sistem administrasi perpajakan. Dalam penerapan e-SPT pada perhitungan PPh Unifikasi dan PPh 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman ternyata masih ada sedikit permasalahan yang mengakibatkan dampak negatif bagi pribadi maupun organisasi tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan e-SPT terhadap perhitungan pada PPh Unifikasi dan PPh 21. Pengabdian ini menggunakan metode obeservasi dimana saya terjun langsung menggunakan aplikasi e-SPT dan teknik pengumpulan data melalui pengalaman dan pencatan-pencatatan terhadap keadaan. Hasil dari pengabdian ini menunjukkan bahwa ternyata masih ada kesalahan dalam penerapan e-SPT pada perhitungan PPh Unifikasi dan PPh 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Hal ini membuat kehadiran saya sangat berguna untuk membantu para pegawai supaya lebih teliti lagi. Dampak dari penelitian ini adalah membuat para pegawai lebih teliti lagi dan tepat waktu dalam menginput data.

**Kata kunci : e-SPT, PPh Unifikasi dan PPh 21, Penerapan e-SPT, Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman**

### ABSTRACT

*The Directorate General of Taxes (DGT) takes advantage of advances in technology and information systems wick are currently developing rapidly and well. Innovation emerged by creating an application (e-SPT) in the tax administratin system. In the application of e-SPT to the calculation of PPh Unification and PPh 21 at the Regiobal Secretariat of Sleman Regency, it turns out that there are still a few problems that have a negative impact on the individual and the organization. Therefore, this study aims to determine the effect of implementing the e-SPT on calculations on PPh Unification and PPh 21. This survey uses the observation method where I derectly use the e-SPT application and data collection tecniques through experience and records of circumstances. The results of this survey show that there are still errors in the application of the e-SPT to the calculation of PPh Unnification and PPh 21 at the Regional Secretariat of Sleman Regency. This makes my presence very useful to hel employees to be more thorough. The impact of this research is to make employees more careful and at the right time in inputting data.*

**Keywords:** : *e-SPT, PPh Unofocation dan PPh 21, Implementation of e-SPT, Regional Secretariat of Sleman Regency*

## **PENDAHULUAN**

Pendapatan di Indonesia diperoleh dari beberapa sumber, salah satunya adalah perpajakan (Roogers, 2020). Pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan pada warga negara sesuai dengan peraturan (Monti, 2019). Wajib pajak diharapkan dapat menjalankan kewajibannya dengan cara menyampaikan SPT tepat waktu dan membayar dengan baik. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi, DJP menyediakan berbagai aplikasi untuk melakukan pengisian dan pelaporan SPT contohnya e-SPT. Pemerintah berharap, dengan adanya e-SPT memudahkan wajib pajak untuk melaporkan kewajibannya.

Ternyata dalam penerapan e-SPT, masih ada kendala-kendala berupa permasalahan-permasalahan. Permasalahan tersebut ternyata terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Permasalahan tersebut dialami oleh salah satu pegawai yang ada di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yaitu Pak Maryono. Dimana beliau merupakan Bendahara Pengeluaran Sekda. Beliau mengatakan permasalahan yang dihadapi adalah adanya nomor Bukti Potong yang tidak ditemukan sedangkan di rumah konfirmasi ada, sudah pernah mengupload ID Billing lalu dilakukan penguploadan lagi sehingga menyebabkan ID billing lebih dari satu, beberapa bagian belum menginput transaksi di SIKD sedangkan sudah ada di DJP, aplikasi sering terjadi kesalahan karena banyak yang memakai aplikasi tersebut, dan subjek tidak mampu mengerjakan sendiri. Kelemahan dari aplikasi e-SPT dalam perhitungan PPh 21 dan PPh Unifikasi adalah kurang efisien dalam mengolah data karena masih ada data data yang lebih dari satu kali diupload. Solusi yang saya berikan terkait permasalahan tersebut adalah memberitahukan kepada para pegawai agar lebih teliti, memberitahukan kepada seluruh bagian agar tepat waktu menginput data.

Pelaporan e-SPT harus dilaporkan secara tepat waktu dan teratur. Jika pelaporan tidak dilaporkan atau terlambat maka akan diberikan sanksi. Sanksi tersebut tertera jelas di hukum Indonesia yaitu Undang- Undang (UU) Ketentuan Umum Perpajakan(KUP) (DPR RI, 2022)

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan kesimpulan dimana dalam penerapan e-SPT tidak selalu berjalan mulus dan ternyata dengan menggunakan aplikasi masih ada kendala yang dihadapi.

## **METODE**

Metode yang digunakan pengabdian adalah metode observasi dan wawancara untuk mendapat data yang lebih akurat sebagai bahan pengamatan. Alasan peneliti memilih metode obeservasi adalah peneliti terjun langsung ke lokasi melakukan pengamatan dan

menggunakan aplikasi penerapan e-SPT dalam perhitungan PPh Unifikasi dan PPh 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap objek. Setelah melakukan pengamatan, pencatatan, dan terjun langsung, pengabdian akan mengolah dari data yang ada dan mencari solusi dari permasalahan yang ada. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman dimulai dari Rabu, 1 Maret 2023 – Sabtu, 1 April 2023. Observasi dilakukan dengan salah satu pegawai yaitu Pak Maryono untuk memberitahukan bahwa masih ada kesalahan dalam perhitungan PPh Unifikasi dan PPh 21. Setelah melakukan observasi, Pak Maryono mengingatkan kembali kepada para pegawai untuk lebih teliti dan tepat waktu dalam menginput data.

## HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Peneliti melakukan pengabdian masyarakat di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Peneliti terjun langsung dalam menggunakan aplikasi e-SPT dalam perhitungan PPh 21 dan PPh Unifikasi. Peneliti didampingi oleh Pak Maryono selaku Bendahara Pengeluaran Sekda. Ketika melakukan pengabdian, ternyata peneliti menemukan adanya permasalahan-permasalahan. Adapun permasalahan tersebut adalah:

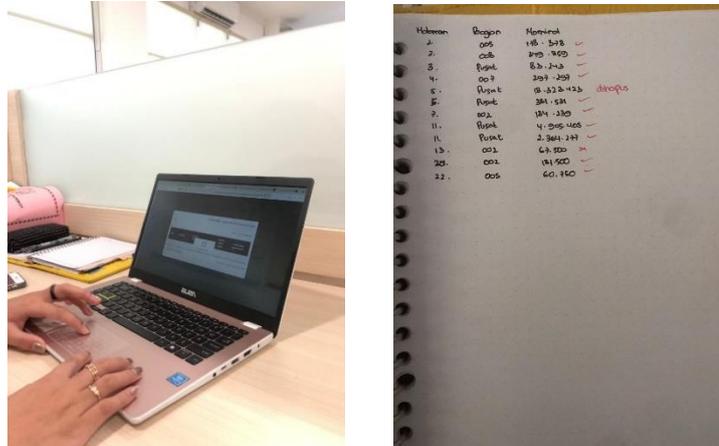
1. Adanya perbedaan antara data yang ada di SIKD dengan di DJP  
Hal tersebut terjadi karena kurangnya teliti dalam menginput data dan mengakibatkan perbedaan jumlah penyetoran. Saya langsung mengatakan kepada beliau bahwa ada data yang berbeda yang ada di SIKD dan DJP. Beliau langsung melihat data dan ternyata ada kesalahan ketika menginput data. Beliau membuka akun DJP, lalu menghapus data tersebut karena jika data tersebut dilaporkan maka data tersebut tidak memiliki NTPN. Alasan terjadi kesalahan tersebut adalah terjadinya kesalahan dalam menginput data dan adanya transaksi yang dibatalkan. Solusi dari permasalahan tersebut adalah memberitahukan kepada para pegawai untuk lebih teliti lagi.



Gambar 1. Pengabdian memberi tahu kepada Pak Maryono bahwa adanya perbedaan anatar data di SIKD dengan di DJP

2. Ketika melaporkan pajak ke DJP, beberapa bagian belum menginput data transaksi di SIKD tetapi di DJP sudah ada

Hal tersebut mengakibatkan proses tersebut tidak bisa dilanjutkan. Hal tersebut terjadi karena kemungkinan dana belum ditransaksikan tetapi sudah membuat ID Billing tetapi terbayar di bulan berikutnya.

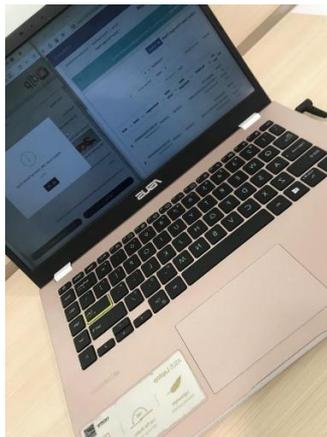


**Gambar 2. Data belum terinput dan saya melakukan pencatatan**

Gambar di atas adalah salah satu contoh bahwa ketika melaporkan data ke DJP, beberapa bagian belum mengupload data di SIKD tetapi DJP sudah ada. Proses yang dilakukan ketika terjadi permasalahan tersebut adalah masuk ke akun SIKD lalu ke form pemindahbukuan karena terdapat selisih angka, lalu angkanya disamakan. Solusinya adalah membuat kode ID Billing dan ke form pemindahbukuan untuk menyinkronkan data.

### 3. Rumah konfirmasi sering eror

Hal tersebut sering sekali terjadi yang mengakibatkan tidak dapat melanjutkan proses penginputan data karena ketika menginput data harus memasukkan NTPN ke rumah konfirmasi. Hal ini terjadi karena banyak yang memakai aplikasi tersebut.



**Gambar. 3 Rumah Konfirmasi Error**

Gambar diatas adalah salah satu bukti bahwa rumah konfirmasi sering eror.

Pelaporan e-SPT harus dilaporkan secara tepat waktu. Jika laporan penerapan e-SPT tidak dilakukan secara tepat maka akan diberikan sanksi. Secara pemda, bendahara

pemda berkewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan pajak atas transaksi pemda dari pungutan setoran dan mendapat hasil. Jika tidak dilaporkan secara tepat, maka dana bagi hasil ditunda pencairannya. Secara KPP maka akan di denda Rp100.000 per SPT.

Selama melakukan pengabdian, pengabdi menemukan beberapa kendala yang dihadapi ketika melaporkan e-SPT PPh Unifikasi dan PPh 21 melalui aplikasi. Kendala-kendala yang dihadapi adalah adanya perbedaan antara data yang ada di SIKD dengan di DJP, ketika melaporkan pajak ke DJP, beberapa bagian belum menginput data transaksi di SIKD tetapi di DJP sudah ada dan yang paling sering adalah rumah konfirmasi eror. Pengabdi memberikan solusi terhadap kendala yang ada berupa memberitahukan kepada para pegawai untuk lebih teliti lagi ketika menginput data dan tepat waktu menginput ataupun mengupload data.

Sebelumnya beliau kewalahan dalam menginput data karena kurangnya waktu jam kerja dan karena data yang mau di input sangat banyak. Dengan kehadiran pengabdi, beliau merasa sangat terbantu dan pengabdi juga memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi selama pengabdian.

Setelah peneliti melakukan observasi, pengabdi dapat membantu beliau dalam penerapan e-SPT pada perhitungan PPh Unifikasi dan PPh 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Para pegawai yang awalnya kurang teliti kini menjadi lebih teliti lagi dan tepat waktu dalam menginput data. Hal ini berarti observasi penerapan e-SPT dalam perhitungan PPh Unifikasi dan PPh 21 di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berhasil.

## **SIMPULAN**

Hasil pengabdian yang dilakukan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman berdampak positif. Berdasarkan hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, pengabdi menyimpulkan bahwa penerapan e-SPT tidak berjalan mulus begitu saja, khususnya di Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman. Ternyata masih banyak kendala permasalahan dalam penerapana e-SPT perhitungan PPh 21 dan PPh Unifikasi. Observasi yang saya lakukan agar dapat mengingatkan kembali kepada para pegawai agar lebih teliti lagi dan tepat waktu dalam menginput data. Pengabdi juga berharap, pengabdian masyarakat ini dapat diterima baik bagi instansi-instansi pemerintah lainnya untuk mencegah terjadi kesalahn lagi.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Terimakasih kepada pihak 1) Universitas Mercu Buana Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi mahasiswanya untuk melakukan pengabdian masyarakat, 2) Sekretariat Daerah Kabupaten Sleman yang mengizinkan pengabdi untuk melakukan pengabdian masyarakat, 3) Bu Dian dan Pak Maryono yang membantu dalam melakukan pengabdian masyarakat, 4) Pak Bayu selaku dosen pembimbing yang membantu dalam

penyelesaian artikel ini dan semua pihak yang mendoakan saya sehingga artikal ini dapat diterbitkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdhul, Y. (2022, September 20). *Metode Observasi: Pengertian, Macam dan Contoh*. Retrieved from deepublish: <https://deepublishstore.com/blog/metode-observasi/>
- Apriliani Kasandra Tumuli, J. J. (2016). ANALISIS PENERAPAN E-SPT DAN E-FILING DALAM UPAYA PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MANADO). *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 102-103.
- DPR RI. (2022). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007*. Retrieved from djp: <https://pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>
- Handayani, R. (2022). *Pengertian, Fungsi, dan Cara Pelaporan SPT Pajak*. Retrieved from PAJAK.COM: <https://www.pajak.com/pajak/pengertian-fungsi-dan-cara-pelaporan-spt-pajak/>
- Monti, R. M. (2019). Regional Autonomy in Realizing Good Governance Roy Marthen Moonti . *International Journal Of Law*, 43-53.
- OnlinePajak. (2023, Februari 24). *SPT: Informasi Lengkap Seputar Surat Pemberitahuan Pajak*. Retrieved from OnlinePajak: <https://www.online-pajak.com/seputar-pajak/spt-adalah#:~:text=Apa%20Itu%20SPT%3F,dalam%20peraturan%20perundang%20Dundangan%20perpajakan.>
- Roogers, M. G. (2020). existence Of Pancasila As A Stats Fundamental Norm Of The Nation And State Of Indonesia In Facing Economic globalization Challenges. *Jour of Adv Research in Dynamical & Control Systems*, 589-595.